



## Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Maha Kuasa atas rahmat dan KaruniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dan perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj IP Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing – masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini di masing – masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip - prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak - pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pangkajene Sidenreng, 10 Januari 2024  
Kepala Bappelitbangda

Ir. Andi Faisal Ranggong, MT.  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19690507 199903 1 010



## Daftar Isi

<b>Halaman</b>	.....	
<b>Sampul</b>		
<b>Kata Pengantar</b>	.....	i
<b>Daftar Isi</b>	.....	ii
<b>Bab I pendahuluan</b>	.....	1
A. Gambaran Umum Organisasi	.....	1
B. Sistematika Laporan	.....	1
<b>Bab II Perencanaan Kinerja</b>	.....	9
A. Perencanaan Strategis	.....	9
B. Perjanjian Kinerja	.....	13
<b>Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023</b>	.....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	.....	16
B. Realisasi Anggaran	.....	32
<b>Bab IV Penutup</b>	.....	38
<b>Lampiran</b>	.....	



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu implementasi dari tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Kinerja merupakan dokumen laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pelaporan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Bappelitbangda mengembang 2 sasaran strategis daerah dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023 yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut telah disusun Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Dan ini adalah tahun terakhir periode tersebut. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 terdokumentasi dalam rencana kerja yang ditujukan untuk mencapai tahapan maupun target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD. Operasionalisasi rencana kerja tersebut melalui rencana kerja dan anggaran sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran dan belanja daerah tahun 2023. LKjIP yang disusun saat ini merupakan LKjIP tahun kelima/terakhir periode RPJMD 2018 – 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Bappelitbangda pada tahun 2023, masih dijumpai beberapa kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Untuk itu sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan pemerintah pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten diperlukan guna mengeliminir kendala terkait regulasi. Selain daripada itu, kompetensi dan integritas sumberdaya aparatur perencana daerah cukup berperan dalam mendukung keberhasilan kinerja perencanaan pembangunan, sehingga perlu semakin dioptimalkan di masa mendatang.

Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya dan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang pada khususnya dan untuk penyusunan dokumen LKjIP pada periode berikutnya harapannya lebih baik lagi.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum Organisasi

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal mendasar dan penting yang diperlukan dalam penyusunan ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Berdasarkan peraturan perundang undangan tersebut diatas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai instansi pun memiliki kewajiban menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappelitbangda Tahun 2018-2023.

keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana keluaran, proses, manfaat dan dampak dari program dan kegiatan tersebut. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidrap telah



menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk tahun anggaran 2023 dan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2023.

## **B. Sistematika Laporan**

### **1. Struktur Organisasi**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 54 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan susunan sebagai berikut :

- a. **Kepala Badan;**
- b. **Sekretaris Badan**
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Perencanaan
- c. **Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah**
  1. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Sosial Pemerintahan
  2. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
  3. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Inovasi dan Teknologi
- d. **Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam Dan Pembangunan Manusia**
  1. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Perekonomian
  2. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Sumber Daya Alam
  3. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
- e. **Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan Dan Pemerintahan**
  1. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Infrastruktur
  2. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Kewilayahan
  3. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Pemerintahan



**f. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

1. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Perencanaan Dan Pendanaan
2. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Data Dan Informasi
3. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan

**2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan tujuan Organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai lembaga perencana mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

**a. Tugas Pokok**

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal menyusun dan menetapkan Rencana Strategis dan rencana Anggaran Satuan Kerja Badan membina dan pengkoordinasian unit kerja dan instansi terkait melaksanakan administrasi kepegawaian, pengendalian dan pelaksanaan kewenangan daerah di bidang penelitian, pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah; melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, serta membuat laporan secara berkala.

**b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
4. Pelaksanaan administrasi badan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.



### **c. Kewenangan**

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidrap, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Merumuskan Rencana Anggaran satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup badan
- d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan badan kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
- f. Melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Mengarahkan dan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi badan
- g. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan dan program kerja dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- h. Mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan dalam pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah
- i. Mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan dalam pemberian Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penelitian, Pengembangan Daerah





- j. Menetapkan alternatif pemecahan masalah dan konsep serta naskah dinas hasil kerja bawahan
- k. Mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- l. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja secara berkala
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi badan.
- n. Merumuskan, menetapkan dan mengkoordinasikan penetapan kinerja badan

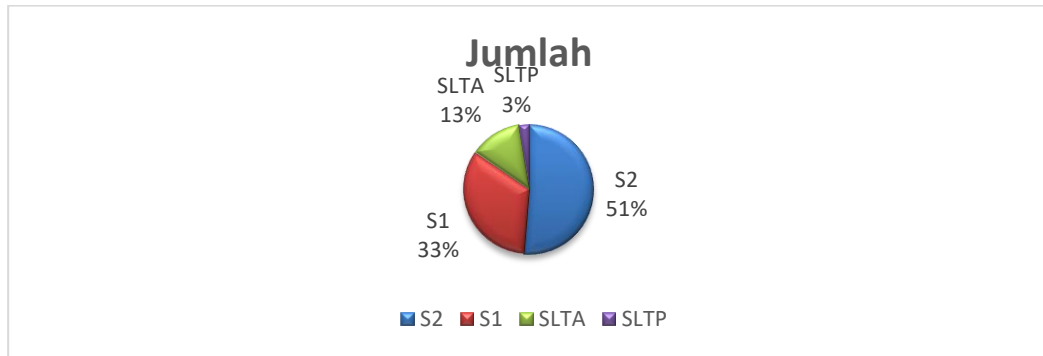
**d. Kepegawaian**

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menyusun dan memfasilitasi perencanaan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana dan sarana prasarana tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut harus ditunjang dengan ketersediaan aparat yang memiliki kompetensi dan kemauan kuat dalam menjalankan Visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Gambaran tentang kondisi kepegawaian perangkat daerah ini dapat digambarkan sebagai berikut;

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Tahun 2023 berjumlah 39 orang PNS yang terdiri atas 17 Orang Laki-laki dan 21 orang perempuan. dan tenaga sosial sebanyak 29 orang.

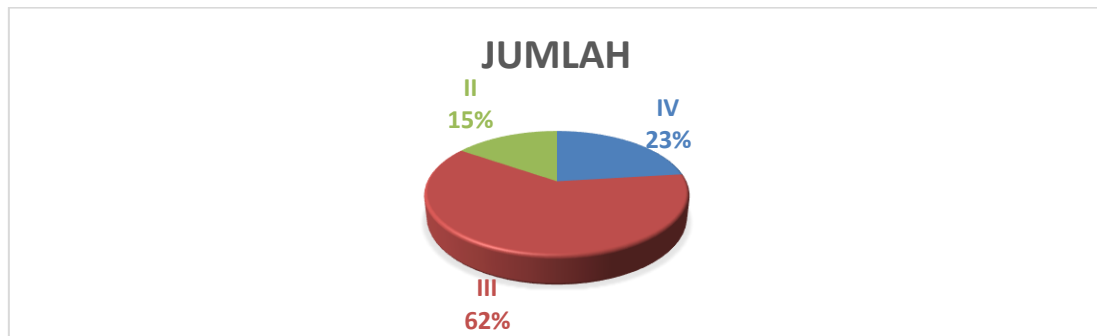
*Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Latar Belakang Pendidikan*

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S2	20
2	S1	13
4	SLTA	5
5	SLTP	1
Jumlah		<b>39</b>



**Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Golongan**

No.	Golongan	Jumlah
1	IV	9
2	III	24
3	II	6
<b>Jumlah</b>		<b>39</b>

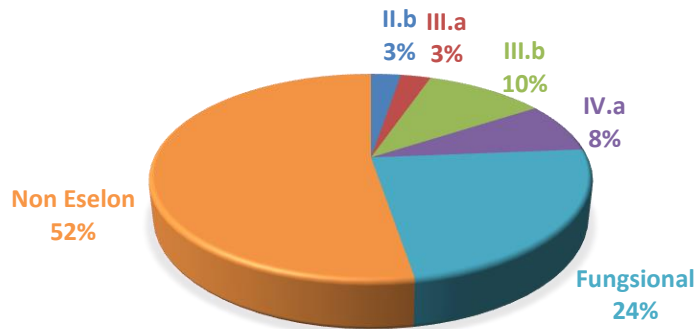


**Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Eselon**

No.	Eselon	Jumlah
1	II.b	1
2	III.a	1
3	III.b	4
4	IV.a	3
5	Fungsional	9
6	Non Eselon	20
<b>Jumlah</b>		<b>39</b>



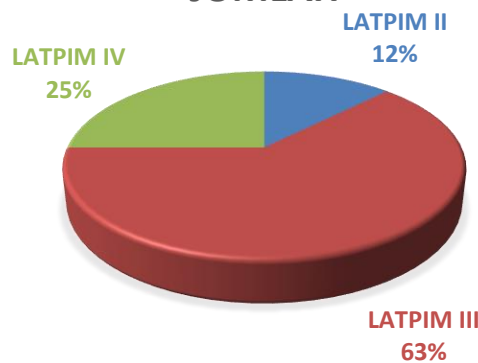
## JUMLAH



### **Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti Diklat**

No.	Diklat	Jumlah
1	LATPIM II	1
2	LATPIM III	5
3	LATPIM IV	2
Jumlah		5

## JUMLAH



### **3. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

#### **a. Maksud**

Penyusunan penyusunan LKjIP Bappelitbangda Tahun 2023 adalah sebagai berikut

- Sebagai alat ukur pelaksanaan program dan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang
- Sebagai informasi atas perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola



- Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang
- Sebagai informasi atas kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap tahunnya
- Sebagai informasi alternatif pemecahan terhadap permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

#### **b. Tujuan**

Tujuan dari disusunnya LKj IP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai berikut : mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi, sehingga kita dapat mengetahui dan menilai bagaimana keberhasilan dan kegagalan SKPD ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kurung waktu satu tahun 2023.

Penyusunan LKj IP ini merupakan fase akhir yang dapat dijadikan sebagai alat untuk evaluasi guna perbaikan kinerja SKPD ini dimasa yang akan datang. Sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, LKj IP merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasan atau pemberi wewenang. Oleh karena itu dalam manajemen modern LKj IP merupakan salah satu media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi.

#### **B. Fungsi Strategis**

Berdasarkan pada Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum mempunyai fungsi strategis yaitu :

- **Berkualitas** adalah perencanaan pembangunan yang sistematis dan terarah yang sesuai tahapan dan memperhatikan kebutuhan, prioritas serta sumber daya yang tersedia.
- **Partisipatif** adalah perencanaan pembangunan daerah melibatkan para pemangku kepentingan baik dari masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur lain yang terkait
- **Akuntabel** adalah perencanaan pembangunan daerah yang transparan, dapat diterima oleh semua pihak dan akurat



Berdasarkan fungsi strategis tersebut di atas maka dirumuskan langkah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan lintas sektor disertai pengendalian monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan sistem partisipatif
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
3. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data, informasi, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas aparatur Bappelitbangda dalam perencanaan pembangunan daerah

### **C. Permasalahan Utama**

Adapun permasalahan utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang harus diselesaikan dalam rangka mewujudkan kebijakan umum pemerintah daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah dapat dirinci sebagai berikut :

1. Kurangnya ketersediaan data dan informasi secara kuantitas dan kualitas sebagai pendukung perencanaan pembangunan.
2. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD maupun antar bidang di lingkungan internal Bappelitbangda.
3. Terbatasnya kemampuan aparatur Bappelitbangda dalam perencanaan pembangunan.
4. Perencanaan pembangunan yang belum konsisten dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
5. Perencanaan pembangunan yang belum terpadu
6. Kurangnya pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Perencanaan Strategis

No.	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke				
					2019	2021	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Jangka Menengah Daerah Dan Tahunan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatkan Hasil Penelitian, Kajian yang Dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	Tingkat pemanfaatan hasil kajian yang ditindaklanjuti	Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar dapat tetap eksis dan unggul dalam era kompetisi yang semakin ketat, setiap instansi dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan melakukan berbagai perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas yang mengarah kepada pencapaian hasil yang lebih optimal. Untuk mampu menjawab berbagai tantangan dan kondisi ketidakpastian dewasa ini setiap instansi perlu menyusun perencanaan strategik.

Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan dalam bentuk rencana induk (master plan) yang komprehensif untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencapaian tujuan organisasi maka misi Badan



Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan sebagai berikut;

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan lintas sector disertai pengendalian monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan sistem partisipatif.
- b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
- c. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data, informasi, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah
- d. Meningkatkan kualitas aparatur Bappelitbangda dalam perencanaan pembangunan daerah

### **1. Tujuan dan Sasaran**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi buapti maka unit organisasi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan Tujuan dan sasaran.

#### **a. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Oleh karena itu tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Terpenuhinya kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan seluruh stakeholder
2. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, kontinuitas, pelaksanaan penyusunan rencana, penetapan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah



3. Menyediakan dan mengelolah data/informasi penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas personil dan kelembagaan sehingga dapat memberikan pelayanan penunjang yang prima kepada semua pihak

**b. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu yang dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu sasaran harus lebih bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan
2. Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan factor terpenting dalam proses perencanaan strategik. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi; Strategi, penetapan kebijaksanaan, dan program operasional.

**a. Strategi.**

Strategi adalah upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dengan memilih alternative terbaik untuk pencapaian tujuan dan sasaran secara lebih terarah. Strategi akan memperjelas makna dan hakikat suatu rencana strategik khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Dengan kata lain strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi. Suatu strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang yang mungkin dapat berubah-ubah. Selain itu hal yang harus diperhatikan ialah bahwa strategi memperhitungkan juga lingkungan organisasi secara keseluruhan yang dapat berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan strategi.

Adapun strategi yang akan dilakukan adalah :





- Melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan secara berkala
- Memfasilitasi dan mendorong semua pemangku kepentingan untuk memanfaatkan hasil penelitian/kajian hasil kelitbangan

**b. Kebijakan.**

Kebijaksanaan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang mengatur secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijaksanaan merupakan pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Untuk itu kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda adalah sebagai berikut;

- 1) Melakukan upaya sinkronisasi antar dokumen perencanaan
- 2) Membangun jaringan dalam rangka kerjasama dengan universitas, LSM dalam melakukan kajian kelitbangan
- 3) Melakukan kerjasama dengan universitas, LSM dalam melakukan kajian kelitbangan
- 4) Melakukan dokumentasi dan publikasi hasil kajian kelitbangan dan kemudian mendorong pemanfaatan hasil kajian

**c. Program.**

Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program operasional merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan.

Beberapa Program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah



## B. Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensin Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %
		Penjabaran Konsistensin Program RKPD Kedalam APBD	100 %
2	Meningkatnya Hasil Kelitbangan Yang Dimanfaatkan	Persenase Hasil Kelitbangan Yang Dimanaatkan	100 %

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang kepada Kepala Bappelitbangda untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Kepala Bappelitbangda dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima (Kepala Bappelitbangda) dan pemberi amanah (Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.



4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Kepala Bappelitbangda pada Tahun 2023 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mewujudkan target kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, Bappelitbangda telah melaksanakan 4 program 15 kegiatan dan 49 sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp 6.591.640.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), yang selanjutnya. secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Bappelitbangda dengan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melaukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Bappelitbangda dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melaukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Bappelitbangda dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten terhadap hasil evaluasuasi APIP Tahun 2022 adalah 70.95 (BB), terhadap hasil rekomendasi tersebut telah dilakukan langkah langkah tindak lanjut sbb :

Rekomendasi	Tindak Lanjut
1. Perencanaan Kinerja	
a. Menyusun SOP Alur Perencanaan Kinerja RPJMd s.d LKjIP.	SOP Alur Perencanaan Kinerja RPJMD s.d LKIP Telah disusun
b. Menyusun Crosscutting	Crosscutting sudah dibuat
c. Menyusun Laporan Monev.	Laporan Monev dilaporan setiap triwulannya di aplikasi E Monev
2) Pengukuran Kinerja	
a. IKU menguraikan defenisi operasional	IKU telah didifenisikan dan sudah



	disertai sumber data
b. Pengukuran kinerja secara berkala dg membuat laporan monev, didokumentasikan rapat-rapat internal terkait pembahasan kinerja.	Telah dilakukan pertemuan berkala terkait laporan triwulan dan sudah didokumentasikan
3) Pelaporan Kinerja	
a. Laporan Kinerja disertai bukti dukung direviu/evaluasi	Laporan Kinerja sudah disertai bukti dukung dan telah direviu
b. Melakukan Upaya perbaikan yang berkesinambungan sebagai Upaya peningkatan kinerja.	Telah dilakukan Upaya-upaya yang berkesinambungan sebagai langkah perbaikan kinerja
4) Evaluasi Internal	
a. Melakukan evaluasi program dengan memanfaatkan rekomendasi-rekomendasi hasil Evaluasi program untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.	Evaluasi dilakukan sebagai langkah perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja
b. Melakukan Upaya dalam meningkatkan jumlah SDM Aparatur.	Menugaskan aparatur lingkup bappelitbangda untuk mengikuti kegiatan peningkatan SDM aparatur
c. Senantiasa melakukan Langkah dalam Upaya meningkatkan implementasi sapip	Telah dilakukan upaya, Langkah dalam upaya meningkatkan implementasi sapip.

Untuk mengukur pencapaian suatu sasaran strategis suatu organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan ini disampaikan dalam bentuk tabel

Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perumusan	Target 2023	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensin Program RPJMD Kedalam RKPD	Jumlah Program yang ada didokumen RPJMD/ Jumlah Program yang ada di Dokumen RKPD x 100 %	100 %	100 %	100 %
	Penjabaran Konsistensin Program RKPDP Kedalam APBD	Jumlah Program yang ada didokumen RKPDP/ Jumlah Program yang ada di Dokumen APBD x 100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Hasil Kelitbangan Gang Dimanfaatkan	Persenase Hasil Kelitbangan Yang Dimanaatkan	Jumlah Kelitbangan yang dihasilkan/ Jumlah Kelitbangan yang direncanakan x 100%	100 %	100 %	100 %

Tabel IKU di atas, kinerja telah mencapai 100 persen dan telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, dan satu indikator belum mencapai 100 persen. Analisis



keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

### 3.1 Capaian Kinerja

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, dan diharapkan tahun 2023 mencapai hasil yang sama. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>1</b>	Persentase Program Kegiatan Yang Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD)
----------	--

Analisis pencapaian **Sasaran 1**: Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan	1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Persen	100.00	100.00	100.00
	2	Penjabaran Konsistensin Program RKPD Kedalam APBD	Persen	100.00	100.00	100.00
Rata rata capaian						100.00

Sesuai Indikator 1 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD perencanaan tahun 2023 sebanyak 132 program dari target 132 program dengan capaian kinerja sebesar 100.00 %, sedangkan Indikator 2 Penjabaran Konsistensin Program RKPD Kedalam APBD sebanyak 127 Program Realisasi 127 Program dengan persentase 100.00 %

#### b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Penjabaran Konsistensin Program RPJMD Kedalam RKPD	96 %	96 %	100 %	98 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %



Penjabaran Konsistensin Program RKPd Kedalam APBD	96%	96%	100 %	98%	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %
---	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	-------	-------

Capaian kinerja dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2021-2023) terhadap indicator kinerja persentase program kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD,RKPD) rata rata mencapai 100 % adapun rincinan sbb :

Indikator 1

- Tahun 2021 Target 132 Program Realisasi 125 Program dengan persentase 96.00 %
- 2022 Target 132 Program Realisasi 127 Program dengan persentase 98.00 %
- 2023 Target 132 Program Realisasi 132 Program dengan persentase 100 %

Indikator 2

- Tahun 2021 Target 132 Program Realisasi 127 Program dengan persentase 96.21 %
- Tahun 2022 Target 127 Program Realisasi 123 Program dengan persentase 98.00 %
- Tahun 2023 Target 127 Program Realisasi 127 Program dengan persentase 100.00 %

**c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1 Penjabaran Konsistensin Program RPJMD Kedalam RKPd	Persen	100.00	100.00	100.00
2 Penjabaran Konsistensin Program RKPd Kedalam APBD	Persen	100.00	100.00	100.00

Persentase Program Kegiatan Yang Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPd) sampai dengan tahun 2023 dari target kinerja 127 program teralisasi 127 program dan capaian 100.00 %.



**d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran koordinasi dan kerjasama yang baik sehingga yang direncanakan dapat tercapai sesuai dengan target waktu yang diharapkan.

Dari 3 program tersebut terdiri dari 16 kegiatan dan 54 sub kegiatan tingkat realisasi fisik/kegiatan mencapai 100 %, ada satu program yang capaiannya tidak mencapai 100 % diakibatkan beberapa sub kegiatan tidak mencapai 100

Pemberian reward dan punishment telah diberlakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan tujuan agar aparatur lingkup bappelitbangda lebih berkinerja agar target yang telah diperjanjikan dapat tercapai. Reward diberikan kepada Tim Penyusun LKJIP atas upaya sehingga Sakip OPD dengan Predikat B, tentunya predikatan itu dapat ditingkatkan menjadi BB pada Sakip tahun Berikutnya. Adapun Punishment diberikan kepada 1 orang ASN yang belum bias mematuhi aturan jam kerja diberikan surat teguran dengan harapan bisa lebih disiplin dan patuh dengan jam kerja.

Kelemahan dari pencapaian sasaran 1 tentunya sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan upaya pencapaian target tahun berikutnya.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan sebesar Rp. 6.162.215.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 5.533.065.988 atau 89.79 persen.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Perencanaan pembangunan yang tepat waktu ini adalah sebanyak 3 program 16 kegiatan dan 54 sub kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah





factor factor yang yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Bappelitbangda Tahun 2023 adalah :

- Dukungan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan
- Dukungan anggaran,sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- Ketetapan perencanaan dan penetapan target serta sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan
- Ketersediaan data pendukung dalam menetapkan sasaran pembangunan daerah serta perencanaan program kegiatan

## 2 Persentase Hasil Penelitian/Kajian Yang Di manfaatkan

Analisis pencapaian **Sasaran 2:** Keselarasan program antar dokumen perencanaan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Persentase Hasil Penelitian/Kajian Yang Dimanfaatkan	Persen	100	100	100
Rata rata capaian					100

Realisasi dari hasil penelitian/kajian dan inovasi yang dimanfaatkan sebanyak dari 4 penelitian/kajian dari target sebanyak 4 atau sebesar capaian 100 %, hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan sbb :

1. Survei ini dilakukan Untuk Mengetahui Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sidrap Pada Unit-Unit Pelayanannya Yang Meliputi: pelayanan Pelayanan Perizinan, pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, dan pelayanan pajak. Tujuannya adalah :
  - a) Memperoleh Data Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Sidrap Dalam Hal Ini Berbagai Instansi Yang Terkait.
  - b) Memperoleh *Feed Back* Umpan Balik Berupa Masukan/Keluhan Terhadap Perkembangan Kebutuhan Masyarakat Untuk Melakukan Perbaikan/Peningkatan Kinerja/Kualitas Pelayanan Secara Berkeseluruhan.



- c) Mengetahui Kesenjangan Antara Harapan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Dengan Kondisi Nyata Dilapangan Yang Dirasakan Melalui Gap Analysis. Mendapatkan Informasi Tentang Peringkat Kepuasan Dan Tingkat Kepentingan Terhadap Unsur-Unsur Pelayanan Dengan Menggunakan Matriks *Importance* Dan *Performance* Sebagai Acuan Prioritas Dalam Melakukan Perbaikan Pelayanan.

## 2. Survei Opini Publik

Survei opini publik terhadap kinerja pemerintah daerah adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur pemerintahan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Tujuan Umum dilakukan survei ini untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan untuk bidang layanan dasar dan layanan umum, Adapun tujuan khusus dari survei ini yaitu pertama sebagai data dan informasi bagi pemerintah tentang kinerja pemerintahan dari sector kondisi perekonomian, layanan pemerintahan/instansi, akses kepada barang dan jasa, indeks kinerja, dan indeks harapan warga. Kedua sebagai mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing program-program unggulan daerah, ketiga sebagai umpan balik dalam memperbaiki kualitas program dan layanan dan yang keempat adalah sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

## INOVASI YANG DIHASILKAN

### 1. PAK ODEK (PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ONLINE DESA DAN KELURAHAN)

Inovasi ini merupakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan secara online tanpa harus ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil namun cukup mengurus di desa/kelurahan. Manfaat dari inovasi ini meningkatkan ketercakupn kepemilikan dokumen kependudukan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan standar pelayanan melalui penerapan SPBE. Sasaran dari inovasi ini adalah Masyarakat Umum Kabupaten Sidenreng



Rappang

## 2. DVD SCHOOL (DASHBOAR VISUALISASI DATA)

Inovasi ini merupakan aplikasi penyajian layanan visualisasi data sekolah, dengan harapan akan semakin meningkatkan efisiensi proses pencarian informasi. aplikasi ini berisi Visualisasi data peserta didik, Visualisasi data perkembangan jumlah peserta didik, Visualisasi data kehadiran guru dan peserta didik, Visualisasi data keadaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan Visualisasi data laporan BK. manfaat inovasi ini yaitu : Tersedianya data dan informasi yang lengkap, yang disajikan dalam visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, Termonitornya perkembangan hasil belajar, kehadiran peserta didik dan kehadiran guru, Tersedianya data visual yang mudah dipahami tersebut, memudahkan pembuatan kesimpulan dan menyederhanakan proses pengambilan keputusan serta membantu dalam hal pencarian data dalam jumlah besar dan waktu yang singkat.

### b. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Hasil Penelitian/Kajian Yang Dimanfaatkan	100	100	100	83	83	100	100	100	100

Capaian kinerja dalam kurun waktu 3 terakhir (2021-2023) terhadap indicator kinerja Persentase Hasil Penelitian/Kajian Yang Dimanfaatkan capain 100 % dan sesuai dengan target yang direncanakan. Dengan rincinan realisasi sbb :

1. Tahun 2020 Target 2 penelitian/kajian yang dimanfaatkan dan capain realisasi 100.00 %
2. Tahun 2021 Target 3 penelitian/kajian yang dimanfaatkan capain realisasi 66.67 %



3. Tahun 2022 Target 6 penelitian/kajian yang dimanfaatkan capain realisasi 83.00 %

**c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1. Persentase Hasil Penelitian/Kajian Yang Dimanfaatkan	Persen	100	100	100%

Realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja 5 Hasil Penelitian/Kajian dan inovasi Yang Dimanfaatkan dan realisasi 100.00 %.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Keselarasan program antar dokumen perencanaan ini didukung dengan dilakukannya pendampingan kepada opd untuk dapat melakukan kajian dan penelitian dan hasil dari kajian dan penelitian tersebut dapat rasakan manfaat dan hasilnya bagi OPD dan Stakeholder yang berkaitan dengan kajian dan penelitian tersebut.

Dari 4 rencana penelitian dan inovasi yang direncanakan sepenuhnya telah dilaksanakan namun tentunya dalam pelaksanaan terdapat catatan yang menjadi bahan perbaikan pada kegiatan kegiatan selanjutnya.

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan dengan anggaran RP. 429.425.000 dengan realisasi Rp. 361.306.923 atau 84.14 %



**b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Adapun beberapa catatan factor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Bappelitbangda Tahun 2023 adalah :

1. Dukungan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam perencanaan dan kelitbangan
2. Dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
3. Ketepatan perencanaan dan penetapan target serta sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan
4. Ketersediaan data pendukung dalam menetapkan sasaran pembangunan daerah serta perencanaan program kegiatan

**B. REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen	100	98.00	98.00
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Laporan	5	5	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	<b>100%</b>	100	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	546	546	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	100



<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	<b>100%</b>	100	100	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	100
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah	%	100	97.41	97.41
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen dan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	5	5	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	180	175	97.22
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan	<b>Persen</b>	100	96.80	96.80
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	414	400	96.62
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>Persen</b>	100	77.78	77.78
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	30	25	83.33
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	15	10	66.67
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	Persen	100	100	100.00
	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD	Persen	100	100	100.00
<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada	<b>Persen</b>	100	100	100



Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	2	100
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	B Acara	2	2	100
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah	B Acara	1	1	100
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	B Acara	1	1	100
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	1827	1827	100.00
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3	3	100
<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	4	4	100
<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	4	100
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<b>Persen</b>	100	100	100
	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	<b>Persen</b>	100	100	100
	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	<b>Persen</b>	100	100	100
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<b>Persen</b>	100	100	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	Dokumen	12	12	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	P Daerah	12	12	100



Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	12	12	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	12	12	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	6	6	100
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100	100	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	6	6	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	3	3	100
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persen	100	100	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	6	6	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	P Daerah	2	2	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	P Daerah	2	2	100





Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur	Laporan	2	2	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	9	9	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	P Daerah	3	3	100.00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	P Daerah	3	3	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Kewilayahan	Laporan	3	3	100
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	Persen	100	100	100
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	1	1	100
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	1	1	100
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data Dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksana Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan	1	1	100
<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah yang diterapkan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	1	100
Total			100	99.00	99.00



C. SERAPAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Jumlah	Realisasi	Selisih	%
			Anggaran			
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	<b>4,327,666,100</b>	<b>4,074,996,516</b>	<b>252,669,584</b>	<b>94.16</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	<b>26,000,000</b>	<b>13,059,634</b>	<b>12,940,366</b>	<b>50.23</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17,169,900	8,085,334	9,084,566	47.09
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	5,838,600	2,809,000	3,029,600	48.11
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,991,500	2,165,300	826,200	72.38
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	<b>3,478,310,600</b>	<b>3,399,620,892</b>	<b>78,689,708</b>	<b>97.74</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	3,449,907,000	3,377,513,897	72,393,103	97.90
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19,134,900	14,096,479	5,038,421	73.67
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	9,268,700	8,010,516	1,258,184	86.43
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	<b>3,796,900</b>	<b>3,067,009</b>	<b>729,891</b>	<b>80.78</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3,796,900	3,067,009	729,891	80.78
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah	<b>391,357,600</b>	<b>295,398,341</b>	<b>95,959,259</b>	<b>75.48</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3,090,600	1,897,000	1,193,600	61.38
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7,300,000	6,485,800	814,200	88.85



	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen dan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3,600,000	3,150,000	450,000	87.50
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	377,367,000	283,865,541	93,501,459	75.22
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	<b>9,709,000</b>	<b>7,700,000</b>	<b>2,009,000</b>	<b>79.31</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9,709,000	7,700,000	2,009,000	79.31
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan	<b>351,612,000</b>	<b>327,311,409</b>	<b>24,300,591</b>	<b>93.09</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,900,000	1,300,000	1,600,000	44.83
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	61,500,000	59,139,142	2,360,858	96.16
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	287,212,000	266,872,267	20,339,733	92.92
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	<b>66,880,000</b>	<b>28,839,231</b>	<b>38,040,769</b>	<b>43.12</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	62,680,000	27,559,231	35,120,769	43.97
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi	4,200,000	1,280,000	2,920,000	30.48
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	<b>963,786,400</b>	<b>746,555,834</b>	<b>217,230,566</b>	<b>77.46</b>
		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD	<b>178,713,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>28,713,000</b>	<b>83.93</b>
1	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada	<b>788,846,600</b>	<b>620,585,341</b>	<b>168,261,259</b>	<b>78.67</b>
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	30,388,000	19,023,000	11,365,000	62.60
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	106,282,000	102,283,391	3,998,609	96.24
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah	20,494,000	9,189,000	11,305,000	44.84



	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	119,173,500	112,128,895	7,044,605	94.09
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	17,464,000	16,893,250	570,750	96.73
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	495,045,100	361,067,805	133,977,295	72.94
2	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	<b>174,939,800</b>	<b>125,970,493</b>	<b>48,969,307</b>	<b>72.01</b>
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	174,939,800	125,970,493	48,969,307	72.01
3	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah	<b>178,713,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>28,713,000</b>	<b>83.93</b>
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	178,713,000	150,000,000	28,713,000	83.93
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<b>294,941,100</b>	<b>235,517,391</b>	<b>59,423,709</b>	<b>79.85</b>
		Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	<b>70,430,000</b>	<b>65,497,850</b>	<b>4,932,150</b>	<b>93.00</b>
		Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	<b>326,678,400</b>	<b>260,498,397</b>	<b>66,180,003</b>	<b>79.74</b>
1	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<b>294,941,100</b>	<b>235,517,391</b>	<b>59,423,709</b>	<b>79.85</b>
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	2,775,300	0	2,775,300	0.00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3,202,800	0	3,202,800	0.00



	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6,671,600	2,052,950	4,618,650	30.77
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	13,787,400	6,542,950	7,244,450	47.46
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	34,035,000	30,677,563	3,357,437	90.14
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	234,469,000	196,243,928	38,225,072	83.70
2	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	<b>70,430,000</b>	<b>65,497,850</b>	<b>4,932,150</b>	<b>93.00</b>
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	38,217,000	35,506,060	2,710,940	92.91
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	32,213,000	29,991,790	2,221,210	93.10
3	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	<b>326,678,400</b>	<b>260,498,397</b>	<b>66,180,003</b>	<b>79.74</b>
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3,137,100	0	3,137,100	0.00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4,642,200	0	4,642,200	0.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	25,936,000	18,680,000	7,256,000	72.02
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur	248,154,000	214,344,897	33,809,103	86.38



	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2,861,000	0	2,861,000	0.00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3,757,000	0	3,757,000	0.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	14,042,800	6,500,000	7,542,800	46.29
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD/ RPJMD Pada Bidang Kewilayahan	24,148,300	20,973,500	3,174,800	86.85
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Persentase hasil kelibngan yang dimanfaatkan	<b>429,425,000</b>	<b>361,306,923</b>	<b>68,118,077</b>	<b>84.14</b>
1	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	Persentase hasil Kelibngan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	<b>359,729,500</b>	340,338,823	<b>19,390,677</b>	<b>94.61</b>
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100,000,000	98,571,400	1,428,600	98.57
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	59,862,500	50,649,522	9,212,978	84.61
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data Dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksana Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	199,867,000	191,117,901	8,749,099	95.62
3	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah yang diterapkan Perangkat Daerah	<b>69,695,500</b>	<b>20,968,100</b>	<b>48,727,400</b>	<b>30.09</b>
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	69,695,500	20,968,100	48,727,400	30.09
<b>Total</b>			<b>6,591,640,000</b>	<b>5,894,372,911</b>	<b>697,267,089</b>	<b>89.42</b>



Alokasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2023 Rp. 6.591.640.000 terealisasi Rp. 5.894.372.911 dengan Persentase 89,42 % dan realisasi fisik 99,74 %



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. TINJAUAN UMUM**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 secara umum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan pada Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang. Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajiban di bidang perencanaan.

#### **B. TINJAUAN KHUSUS**

Kendala yang dialami pada Tahun Anggaran 2023 adalah terhadap dokumen/laporan yang disusun adalah data yang menjadi pendukung dalam penyusunan terlambat disampaikan sehingga proses penyelesaian menjadi lebih lama, walau demikian pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan lainnya secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

#### **C. KESIMPULAN**

Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun anggaran 2023 dapat melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya dan melaksanakan kewajibannya.

Dalam pencapaian sasaran dari beberapa sasaran strategis yang dihadapi, secara umum dapat diwujudkan, meskipun demikian masih ada kekurangan-kekurangan dalam tingkat pemanfaatan (benefit) dari hasil perencanaan.

#### **D. RENCANA TINDAK LANJUT**

Untuk selanjutnya Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang akan menganggarkan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan akan memperhatikan tingkat pemanfaatan (benefit) dan hal utama yang dilakukan adalah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai prinsip Good Governance, yang





menempatkan masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan dan Tahun 2023 Bappelitbangda sudah memiliki fungsional perencana hasil penyetaraan dari Pejabat Eselon IV menjadi Fungsional Perencana namun masih perlu dilakukan peningkatan kompetensi melalui Diklat, Kursus, Workshop Peningkatan Kapasitas